

Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

M Fahmi Zulvan^{1*}, Heppy Purbasari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Abstrak. *Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk perkembangan Kabupaten dan Kota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh investasi, belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah Kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali, pada periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari website Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota beserta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, penelitian ini memperoleh 360 Kabupaten dan kota selama 2018 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi berganda sebagai alat untuk menjawab hipotesis dan model penelitian. Hasil penelitian ini ialah bahwa investasi dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti banyaknya investasi dan PAD yang dikelola pemerintah daerah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan kota. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena Kabupaten dan Kota yang memiliki belanja modal tinggi maka akan menurunkan nilai pertumbuhan ekonomi.*

Kata kunci: *Investasi; Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.*

Abstract. *Economic growth is very important for the development of regencies and cities. The purpose of this study was to determine the effect of investment, capital expenditure, and local revenue (PAD) on economic growth. This study uses a population of district and city local governments in the Java and Bali regions, in the period 2018 to 2020. Furthermore, this study uses quantitative methods with data sources derived from the website of the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia and the Central Bureau of Statistics (BPS). The data used are in the form of district and city government financial reports and economic growth. Based on the sampling criteria, this study obtained 360 districts and cities from 2018 to 2020. This study uses multiple regression testing as a tool to answer the hypothesis and research model. The results of this study are that investment and PAD affect economic growth, which means that the amount of investment and PAD managed by local governments can cause economic growth in regencies and cities. Meanwhile, capital expenditure does not affect economic growth because regencies and cities that have high capital expenditure will reduce the value of economic growth.*

Keywords: *Investment; Capital Expenditure; Local Revenue; Economic Growth.*

* Corresponding Author. Email: b200190192@student.ums.ac.id^{1*}.

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata di setiap daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 Undang – undang No.32 tahun2004. Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri dan meningkatkan ekonomi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi atau kebijakan desentralisasi memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomisuatu daerah (Saraswati, 2018).

Menurut Alim (2023), salah satu strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan disentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, yaitu dengan mencapai standar minimal pelayanan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana umum yang memenuhi kebutuhan daerah, serta mempermudah pengawasan dan pengelolaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mengelola keuangan dan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Muryawan & Sukarsa, 2016). Menurut Kharisma (2013), desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal. Asas desentralisasi adalah *money-following fuction*, dengan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Christia & Ispriyarso (2019), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa bergantung dengan adanya bantuan dan

pembagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana public sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat melakukan kebijakan berupa pemberian dana transfer yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN dengan tujuan terjadinya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Kusuma, 2016). Untuk meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana transfer, daerah perlu mengoptimalkan semua potensi dalam memperoleh pendapatan (Alim, 2023). Maka pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengambil kebijakan fiskal dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerahnya masing masing secara tepat dan efisien. Optimalisasi pendapatan daerah harus dicantumkan secara jelas dalam APBD sebagai rencana pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran untuk pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang harus dicantumkan dalam APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, meskipun sering terjadi masalah akibat rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat diambil secara optimal (Saraswati, 2018). Melalui UU Nomor 1/2022 tentang kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan, melalui peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah secara akumulasi seharusnya akan lebih memberikan dampak yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu penerimaan dari PAD diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada

peningkatan belanja modal agar kualitas pelayanan publik dapat membaik (Saraswati dan Ramantha, 2018). Belanja modal diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur publik, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Alim, 2023). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 terkait peningkatan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan tujuan mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fasilitas umum (Priambudi, 2017). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Dewi, 2006). Belanja Modal bersifat menambah aset tetap dan inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi hal ini juga akan menambah anggaran biaya pemeliharaan sehingga tinggi rendahnya belanja modal akan mempengaruhi kinerja diberbagai sektor pemerintah (Alim, 2023).

Maka dari itu, peran belanja modal dalam peningkatan perekonomian sangatlah penting karena akan berdampak pada tahap selanjutnya yaitu produktivitas masyarakat. Menurut Zebua (2014), pemerintah melakukan belanja daerah baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja modal dengan harapan terjadi peningkatan aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Pemerintah daerah membentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah atau menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah tersebut. Nurzen (2016) menyatakan adanya belanja modal berupa aset tetap yang berasal dari investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, hal tersebut menjadi prasyarat utama dalam memberikan standar minimum

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Menurut Sukirno (2015), investasi pengeluaran atau penanaman modal kepada suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi barang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat investor yaitu sumberdaya alam, dan jumlah penduduk yang tinggi menjadi target pasar yang besar bagi investor untuk melakukan investasi, infrastruktur yang baik juga menjadi faktor ketertarikan bagi seluruh masyarakat, maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan perekonomian di daerah tersebut (Galina, 2012).

Menurut Buana (2018), Investasi Pemerintah daerah meliputi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaan atau pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD atau badan usaha lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan penghasilan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa bantuan modal kerja, pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat, dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan usaha mereka yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2013), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan perekonomian dalam kemampuan satu daerah untuk menyediakan jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Berdasarkan definisi diatas salah satu komponen pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya keberlangsungan persediaan barang. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari naik atau turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Dalam upaya meningkatkan PDRB, pemerinyah dituntut untuk dapat menekan kemiskinan dengan cara peningkatan Pendidikan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah menghadapi banyak kendala dalam optimalisasi investasi untuk daerah yang membutuhkan, seperti

rendahnya tingkat pemberian fasilitas pendanaan terhadap usaha mikro dan menengah, rendahnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, rendahnya mobilitas faktor produksi, dan disparitas sumberdaya alam. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi kemandirian daerah yang pada tahap selanjutnya akan berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh investasi, belanja modal, dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi empiris pada kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2020).

Tinjauan Literatur

Agency theory (Teori Keagenan)

Agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent*. Dalam teori ini pemerintah daerah sebagai *agent*, dan masyarakat sebagai *principal*. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi daripada pihak masyarakat. Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh *agent* akibat dari pengendalian intern yang tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyelewengan dan tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan (Sulaiman *et al.*, 2021). (N. K. Putri & Mahmud, 2015), menyatakan pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meningkatnya akuntabilitas memberikan dampak positif dalam pemberian informasi terhadap pemerintah daerah yang berarti *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang.

Teori Fiscal Federalism

Definisi Teori Fiscal Federalism yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave dan

Oates (1972) dalam (Muhammad, 2021), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didapat dengan adanya desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Oates (1972) dalam (Muhammad, 2021), desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena pemerintah pusat atau daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang publik. Zhang & Zhou (1998) dalam (Muhammad, 2021), menyatakan bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah lebih mengetahui daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik. Hal tersebut menciptakan efisiensi kegiatan dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama dalam suatu negara baik negara maju maupun negara sedang berkembang (Rizky *et al.*, 2016). Negara akan melakukan berbagai macam cara dan strategi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi ((Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pertumbuhan ekonomi akan menjadi gambaran atau indikasi akan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negara yang menghuni negara (Heryanti *et al.*, 2019). Pertumbuhan ekonomi menurut (Jhingan, 2012) merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan selalu dalam ukuran persen (Winarni *et al.*, 2020).

Investasi

Investasi merupakan keputusan yang diambil manajer terkait pengalokasian dana pada berbagai macam aktiva (Winarni *et al.*, 2020). Keputusan investasi merupakan keputusan bisnis di luar keputusan keuangan yang mengunggulkan besarnya aktiva lancar, aktiva

tetap, dan aktiva lainnya yang dimiliki perusahaan (Sari *et al.*, 2016). Investasi merupakan penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial (Winarni *et al.*, 2020). Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Gwijangge *et al.*, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

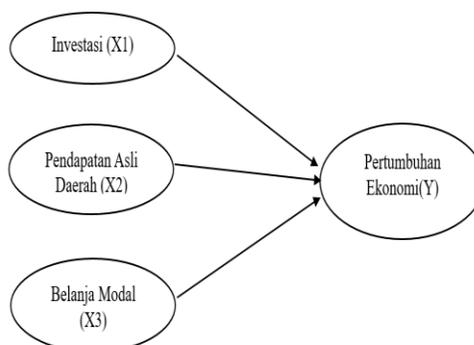
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan pemerintah, menyediakan fasilitas pelayanan publik dan membangun infrastruktur (Saleh, 2020). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri (Budiarso *et al.*, 2015). Semakin banyak pendapatan yang didapatkan, akan sangat memungkinkan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri tanpa tergantung dari dana transfer pemerintah pusat (Ramadhan, 2019). Suryani & Pariani (2018), berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah.

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset termasuk komponen belanja modal (Suryani & Pariani, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Sukma & Panji, 2018), juga berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan berbagai fasilitas publik merupakan tujuan utama dalam pengeluaran belanja modal. Pembangunan berbagai infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah (Suryani & Pariani, 2018). Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat (Rizky *et al.*, 2016).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Purba (2020) Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan di suatu negara yang sedang berkembang. Investasi biasa berasal dari pihak asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Gwijangge *et al.*, 2018). Investasi merupakan salah satu

variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Karenanya pemerintah setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun investasi luar negeri. Hal ini menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hipotesis ini terbentuk atas dasar hasil penelitian dari (R. D. S. Putri & Muljanto, 2021), (Purba, 2020) dan (Hellen *et al.*, 2018) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun menurut (Sari *et al.*, 2016), (Winarni *et al.*, 2020) dan (Agustin, 2022) investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Muhammad, 2021). Dana-dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Menurut (Mamuka *et al.*, 2019) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut, dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada didaerah tersebut oleh pemerintah daerah tersebut yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah itu sendiri. Hipotesis ini terbentuk atas

dasar hasil penelitian dari (Sinaga *et al.*, 2022), (Yasin, 2020) dan (Mamuka *et al.*, 2019) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun menurut (Ngurah & Kartika, 2014) PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Halim, 2007) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini diharapkan akan memiliki manfaat dalam jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Kinerja perekonomian daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik apabila pengeluaran pemerintah daerah atau belanja modal digunakan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif. Menurut (Winarni *et al.*, 2020) pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perkembangan factor produksi yang berupa modal, tenaga kerja dan teknologi. Belanja modal diperlukan untuk memenuhi factor-factor pertumbuhan ekonomi tersebut. Hipotesis ini terbentuk atas dasar hasil penelitian dari (Winarni *et al.*, 2020), (Fajri, 2016) dan (Yunus & Amirullah, 2019) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun menurut (Mamuka *et al.*, 2019), (Rizky *et al.*, 2016) dan (Yasin, 2020) belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, untuk menguji hipotesis menggunakan analisis data yang bersifat statistic (Sugiyono, 2019). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), dan Badan Pusat Statistika BPS. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi berupa data laporan Keuangan setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2018 sampai 2020. Adapun kriteria sampel penelitian adalah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali yang mempublikasikan Laporan Keuangan Daerah melalui web Pemerintah Daerah, dan tingkat PDRB di Badan Pusat Statistik pada publik periode tahun 2018 sampai 2020. Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dalam Pemerintah Daerah menggunakan variable PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) dalam pengukurannya. PDRB adalah nilai dari seluruh produk barang dan jasa yang di produksi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu tanpa mempertimbangkan adanya faktor kepemilikan. Dalam suatu wilayah Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan Produksi sebagai barang dan jasa (Nindia, 2021). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode analisis SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Pengujian hipotesis meliputi uji asumsi klasik sebagai syarat regresi linier berganda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji normalitas

dalam penelitian ini menggunakan *Central Limit Theorem* (CLT). Dasar pengambilan keputusan adalah jumlah sampel, yaitu jika sampel dengan $N > 30$ maka dapat dikatakan bahwa CLT akan semakin akurat atau semakin mendekati distribusi normal (Lind, Marchal and Wathen, 2014). Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 360 dengan jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa sampel lebih dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini Normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diterapkan dengan menimbang besarnya tolerance *value* dan besarnya *Variance Inflating Factor* (VIF). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai tolerance harus $\geq 0,10$ dan nilai VIF harus ≤ 10 . Hasil uji multikolinieritas dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Dependen.

Tabel 1. Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Investasi	0,520	1,922
Pendapatan Asli Daerah	0,380	2,632
Belanja Modal	0,403	2,483

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2023.

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji *Rank Spearman*, dalam uji varians untuk menentukan signifikansi atau sig (*2-tailed*) $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (<i>2-tailed</i>)	Keterangan
Investasi	0,085	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan Asli Daerah	0,768	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,000	Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.

Dalam analisis regresi pada Tabel 2, ditemukan bahwa tingkat signifikansi variabel Investasi sebesar 0,085, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,768. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada variabel Investasi dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, variabel Belanja Modal menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000, mengindikasikan terjadinya Heteroskedastisitas. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Belanja Modal memiliki dampak signifikan terhadap heterogenitas data, dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 diketahui bahwa pengaruh Belanja Modal pada model regresi memiliki variasi yang tidak merata, menambah kompleksitas dalam interpretasi hasil analisis.

Uji Hipotesis
Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	635655448638,165	2688790246848,250		0,236	0,813
Investasi	17,485	5,342	0,169	3,273	0,001
Pendapatan Asli Daerah	17,906	3,315	0,326	5,401	0,000
Belanja Modal	40,095	7,917	0,297	5,064	0,000

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.

Berdasarkan tabel 4, dapat diubah menggunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$EM = 635655448638,165 + 17,485I + 17,906PAD + 40,095BM$$

Berdasarkan model regresi linier berganda diatas arah dari hasil koefisien regresi penelitian ini dapat di interpretasikan sebagai berikut:

- 1) *Constant* = 635655448638,165 dengan arah positif, hal ini dapat diinterpretasikan jika variabel independen dapat di asumsikan konstan, maka rata-rata pengungkapan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan atau terbukti berpengaruh.
- 2) Koefisien regresi pada variabel Investasi sebesar 17,485 dengan arah positif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika Investasi naik sebesar Rp 1 maka

Uji AutoKorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

dL	Durbin-Watson	4-du
1,7382	1,991	2,201

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.

Hasil uji autokorelasi pada tabel 3, menunjukkan bahwa data penelitian ini mempunyai nilai D-W sebesar 1,991, sedangkan nilai dl sebesar 1,7382 dan du sebesar 1,7990. Berdasarkan data tersebut maka hasil kriteria $dl < d < 4-du$ atau $1,7990 < 1,991 < 2,201$ dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen.

Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 17,485.

- 3) Koefisien pada variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,906 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 1 maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 17,906.
- 4) Koefisien pada variabel Belanja Modal sebesar 40,095 menunjukkan bahwa naik sebesar Rp 1 maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 40,095.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	Adjusted R Square
1	,711 ^a	0,502

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti, 2023.

Dalam penelitian ini menggunakan Uji

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam table 5, *Adjusted R Square* sebesar 0,502 atau 50,2% artinya bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 50,2% sedangkan sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti: Pajak Daerah, Angkatan Kerja, Kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah.

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

F	Sig.
121,478	,000 ^b

Berdasarkan tabel 6, hasil uji simultan F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan *fit model regression*.

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

	t	Sig.
Investasi	3,273	0,001
Pendapatan Asli Daerah	5,401	0,000
Belanja Modal	5,064	0,000

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023.

Hasil uji statistic t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 7, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel Investasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima atau variabel Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima atau variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 3) Variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih

kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima atau variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setelah melakukan pengujian H₁ (Hipotesis satu) menyatakan bahwa variabel Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. D. S. Putri & Muljanto, 2021) yang menyatakan bahwa Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah telah mendukung peningkatan investasi didaerahnya mengingat keadaan disetiap daerah yang berbeda di setiap daerah yang berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam peningkatan Investasi di wilayah kabupaten dan kota setempat. Hal tersebut dapat dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang diterima, sehingga berdampak pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setelah melakukan pengujian H₂ (Hipotesis dua) mengungkapkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga *et al.*, 2022), (Yasin, 2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dalam melakukan perbelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola daerahnya tanpa bergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Setelah melakukan pengujian H₃ (Hipotesis tiga) mengungkapkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2016) dan (Yunus & Amirullah, 2019a), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor public secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekilar maupun investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di daerah tersebut yang dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang berarti Investasi yang dilakukan suatu Kabupaten dan Kota di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2020 akan mempengaruhi tingginya Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang berarti Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu Kabupaten dan Kota di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2020 akan mempengaruhi tingginya Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tersebut. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan terjadinya Heteroskedastisitas ketika dilakukan uji Heteroskedastisitas, yang berarti Belanja Modal yang dilakukan suatu Kabupaten dan Kota di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2020 tidak mempengaruhi tingginya Pertumbuhan Ekonomi di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

Agustin, N. C. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Konsumsi, Investasi Asing Langsung, Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 8 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(2).

Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.

Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.

Gwijangge, L., Kawung, G. M. V., & Siwu, H. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(06), 45–55.

Hellen, Mintarti, S., & Fitriadi. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 28–38. DOI: <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490>

Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21.

Jhingan, M. (2012). *Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press.

Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118–128.

Muhammad, N. F. (2021). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PDRB PER KAPITA, TAX EFFORT, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2017). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 10(2), 1–9.

- Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 79–92.
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 196–204.
- Putri, N. K., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8.
- Putri, R. D. S., & Muljanto, S. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor-Import) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 6(1), 13–26.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. DOI: <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16. DOI: <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009>
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111. DOI: <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Sari, M., Syechalad, Mohd. N., & Majid, Sabri. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. DOI: <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. DOI: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sukma, A. N. P. G., & Panji, I. B. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Sulaiman, S. N., Morasa, J., & Gamaliel, H. (2021). the Influence of Good Corporate Governance on the Company Performance of Consumer Goods Industry Companies Listed on Idx. *Jurnal EMBA*, 9(1), 470–484.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.

- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447. DOI: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946>
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. DOI: <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186–193.